



BAB 8

KEDATANGAN SEKUTU SERTA PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

A

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dengan Kekuatan Senjata

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu kemudian memerintahkan Jepang untuk melaksanakan status quo, yaitu menjaga situasi dan kondisi sebagaimana adanya pada saat itu sampai kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia. Sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya, Jepang mematuhi perintah Sekutu tersebut. Pada awal tahun 1945, pihak Sekutu memutuskan bahwa pasukan-pasukan Amerika akan memusatkan perhatian pada pulau-pulau di Jepang, sedangkan tanggung jawab atas Indonesia dipindahkan dari **South West Pacific Command (SWPC)** atau Komando Pasifik Barat Daya (di bawah Amerika Serikat) kepada **South East Asia Command (SEAC)** atau Komando Asia Tenggara (di bawah Inggris). SEAC berada di bawah komando Letnan Jenderal Lord Louis Mountbatten.

Pada tanggal **29 September 1945**, tibalah pasukan Inggris (SEAC) di Jakarta di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pasukan ini bernaung di bawah bendera **AFNEI** (Allied Forces Netherlands East Indies/Pasukan Sekutu Hindia Belanda). Pasukan AFNEI dipusatkan di wilayah Barat Indonesia terutama Sumatera dan Jawa, sedangkan daerah Indonesia lainnya, terutama wilayah Timur, diserahkan kepada angkatan perang Australia. AFNEI disertai beberapa tugas sebagai berikut.

- Menerima penyerahan Jepang,
- Membebaskan tawanan perang Jepang yang berasal dari Eropa,
- Melucuti dan memulangkan tentara Jepang,
- Menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintahan sipil,
- Mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan Sekutu.

Semula, kedatangan mereka disambut hangat oleh rakyat Indonesia. Namun, ketegangan mulai terjadi ketika diketahui bahwa Inggris membawa serta **NICA** (*Netherlands Indies Civil Administration*). NICA adalah otoritas resmi semimiliter di bawah Sekutu yang bertugas mengendalikan pemerintahan sipil di Hindia-Belanda setelah Jepang menyerah. Kecurigaan dan ketegangan itu beralasan karena banyak pegawai NICA berkebangsaan Belanda, yang sepertinya memang sudah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Indonesia.

Kedatangan NICA yang membonceng Sekutu (Inggris) mengundang ketegangan karena rakyat dan pejuang Indonesia yakin bahwa sejak awal Belanda berniat menduduki kembali Indonesia. Namun, Belanda juga sadar bahwa hal itu tidak dapat mereka lakukan sendirian. Mereka menumpukkan harapan pada Inggris. Kecurigaan semakin nyata ketika NICA mempersenjatai kembali bekas anggota *Koninklijk Nederlands Indies Leger (KNIL)* yang baru saja bebas dari tahanan Jepang. Di berbagai daerah, NICA dan KNIL yang didukung Sekutu (Inggris) melancarkan provokasi dan teror terhadap para pemimpin nasional. Hal ini memicu ketegangan-ketegangan baru.

Untuk meredakan ketegangan tersebut, pada tanggal 1 Oktober 1945 panglima AFNEI menyatakan memperlakukan pemerintahan Republik Indonesia yang ada di daerah-daerah sebagai kekuasaan de facto. Karena pernyataan tersebut, pemerintah Republik Indonesia menerima AFNEI dengan tangan terbuka, bahkan memerintahkan para pejabat daerah untuk membantu tugas AFNEI.

Dalam kenyataannya, kedatangan tentara Sekutu di daerah-daerah selalu menimbulkan insiden. Tentara Sekutu sering menunjukkan sikap yang tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, tampak semakin jelas bahwa NICA ingin mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa **AFNEI menyimpang dari misi awalnya**. Kenyataan ini memicu pertempuran di daerah-daerah seperti Surabaya, Sukabumi, Medan, Ambarawa, Manado, dan Bandung.

1. Pertempuran Medan Area (Sejak 13 Oktober 1945)

Pasukan Sekutu mendarat di Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Sama dengan di tempat-tempat lain, awalnya kedatangan pasukan Sekutu disambut dengan baik oleh pemerintah Indonesia di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Teuku Moh. Hasan mempersilakan tim **Relief of Allied of War and Internees (RAPWI)**, yang bertugas membantu pembebasan para tawanan perang, untuk mendatangi tempat-tempat para tahanan berada, seperti di Pulu, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi. Gubernur juga mengizinkan Sekutu untuk menempati beberapa hotel di Kota Medan.

Dalam kenyataannya, Sekutu dan NICA mempersenjatai para bekas tawanan ini serta membentuk **Medan Batalyon KNIL** dengan tugas utama: mengambil alih kekuasaan di Kota Medan. Hal ini menimbulkan konflik dengan TKR dan **Barisan Pemuda Indonesia (BPI)** pimpinan **Achmad Tahir**. Insiden pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945, di Hotel Bali Medan. Insiden bermula ketika seorang penghuni hotel merampas dan menginjak-nginjak lencana merah putih yang dipakai oleh warga setempat. Hotel tersebut kemudian diserbu para pemuda. Sebanyak 96 orang tewas dalam insiden tersebut, sebagian besar orang-orang NICA.

Setelah kejadian tersebut, pasukan Sekutu mengultimatum para pemuda dan rakyat di Kota Medan agar menyerahkan senjatanya kepada Sekutu. Sementara itu, NICA mulai melakukan aksi-aksi teror kepada rakyat. Ultimatum ini tidak dihiraukan, dan sebaliknya malah semakin mengobarkan semangat perlawanan penduduk. Lama kelamaan, pihak Sekutu dan NICA terdesak. Hal ini disebabkan pemuda dan TKR sering berhasil menghadang serta menyerbu pasukan Sekutu yang sedang melakukan patroli. Dalam rangka membatasi gerak maju serta penghadangan para pemuda, pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area (batas resmi wilayah Medan) di berbagai pinggiran Kota Medan. Tulisan ini semacam "garis polisi", yang diyakini akan menghambat gerak maju serta serbuan para pemuda dan TKR terhadap pasukan Sekutu. Karena tulisan inilah, wilayah yang menjadi markas Sekutu di Kota Medan dikenal sebagai **Medan Area**.

Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris bersama NICA berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes, Namun, usaha ini berhasil digagalkan. Bahkan dalam insiden ini, para pemuda dan TKR berhasil menculik seorang perwira Inggris serta menghancurkan sejumlah truk pengangkut tentara mereka. Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap Kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, tentara Inggris mendesak agar pemerintahan Republik Indonesia keluar dari Kota Medan. Gubernur, wali kota dan markas TKR pun terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, pada bulan Agustus 1946 dibentuk **Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area**. Komando ini terus mengadakan serangan terhadap Sekutu di Medan.

2. Pertempuran Ambarawa (Sejak 26 Oktober 1945)

Ambarawa adalah kota yang terletak di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di antara Kota Semarang dan Magelang, atau antara Kota Semarang dan Solo.

Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethell mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Kedatangan Sekutu mulanya disambut baik. Gubernur Jawa Tengah **Mr. Wongsonegoro** bahkan menyepakati menyediakan bahan makanan serta bantuan lain yang diperlukan demi kelancaran tugas Sekutu. Pihak Sekutu juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Akan tetapi, NICA yang membonceng pasukan Sekutu mempersenjatai para bekas tawanan tersebut. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia.

Konflik bersenjata pun tidak dapat dihindari. Bermula di Magelang pada tanggal Oktober, pertempuran berlanjut antara tentara Sekutu dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pertempuran baru berhenti ketika Presiden Soekarno tiba Magelang pada tanggal 2 November 1945 bersama-sama dengan Brigjen Bethell, yang kemudian menghasilkan sejumlah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pihak Sekutu. Berikut ini 3 dari 12 butir kesepakatan antara Indonesia dan Sekutu.

- Sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang dalam rangka menyelesaikan tugas pokoknya, yaitu mengurus para tahanan, tetapi dengan jumlah yang terbatas,
- Jalan raya antara Magelang dan Semarang tetap terbuka bagi lalu lintas tentara Sekutu dan masyarakat Indonesia,
- Sekutu tidak akan mendukung aktivitas NICA dalam badan- badan yang berada di bawah kekuasaannya.

Dalam kenyataannya, pihak Sekutu melanggar kesepakatan tersebut, salah satunya dengan menambah jumlah pasukannya di Magelang. Karena alasan tersebut, pada tanggal 20 November 1945 terjadi pertempuran antara TKR dan pasukan Sekutu di Ambarawa. Pasukan Sekutu yang berada di Magelang pun dikirim ke Ambarawa. Pasukan Sekutu menjatuhkan bom di desa-desa sekitar Ambarawa sehingga TKR terpaksa menarik pasukannya ke wilayah yang aman.

Pada tanggal 21 November 1945, datang bantuan TKR dari Purwokerto dan Yogyakarta. Mereka mengepung Ambarawa dengan menduduki desa-desa di sekitar kota tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 26 November 1945, pimpinan TKR dari Purwokerto, yang bernama **Letnan Kolonel Isdiman** gugur dalam pertempuran. Kedudukannya kemudian digantikan oleh atasannya langsung, yaitu **Kolonel Soedirman**.

Kehadiran Kol. Soedirman memberikan nafas baru kepada pasukan-pasukan RI. Koordinasi diadakan di antara komando- komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin Siasat yang diterapkan adalah serangan mendadak di semua sektor. Sementara itu, bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Merasa yakin bahwa posisi tentara Sekutu di dalam kota mulai terdesak, pada tanggal 12 Desember 1945 Kolonel Soedirman memerintahkan untuk mengepung Ambarawa dari berbagai penjuru. Pertempuran berlangsung sengit. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa serta memaksa Sekutu menarik kembali pasukannya dari Ambarawa ke Semarang.

Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya **Monumen Palagan Ambarawa**. Selain itu, tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau **Hari Juang Kartika**.

3. Pertempuran Surabaya (10 November 1945)

Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Sekutu. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme.

Tentara Sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, di bawah pimpinan Brigjen A.W.S. Mallaby. Kedatangan mereka ketika itu disambut oleh gubernur Jawa Timur **R.M.T.A. Soeryo**. Dalam pertemuan dengan Gubernur Soeryo, disepakati bahwa Inggris dipersilakan memasuki kota dan mendatangi objek-objek yang sesuai dengan tugasnya, seperti tempat tahanan. Namun, kesepakatan ini dilanggar pasukan Inggris dengan menduduki kantor pos besar, pangkalan angkatan laut di Tanjung Perak, gedung Bank Inferio, serta lokasi-lokasi penting lainnya keesokan harinya. Bahkan pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Inggris menyebarkan pamphlet menggunakan pesawat tempur, yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang telah mereka rampas dari tentara Jepang.

Gubernur pun memerintahkan agar para pemuda dan rakyat Surabaya bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Kontak senjata pertama dengan Inggris terjadi siang hari pada tanggal 27 Oktober 1945 tersebut, yang kemudian meluas dengan cepat dan berubah menjadi perlawanan merebut kembali lokasi-lokasi penting yang telah diduduki oleh tentara Sekutu.

Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1945, lokasi-lokasi penting itu berhasil direbut kembali oleh para pemuda. Terdesak oleh serangan rakyat Surabaya, A.W.S. Mallaby meminta bantuan kepada Mayjen D.C. Hawthorn, komandan tentara Inggris di Jawa. D.C Hawthorn lalu menghubungi Presiden Soekarno, meminta bantuannya untuk menyelesaikan pergolakan.

Keesokan harinya pada tanggal 29 Oktober 1945, Soekarno didampingi Wakil Presiden Moh. Hatta, Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin, dan Mayjen D.C. Hawthorn tiba di Surabaya. Di Surabaya, dengan sebuah jeep pinjaman Inggris, Soekarno berkeliling menyerukan gencatan senjata sambil menunggu hasil perundingan antara Indonesia dan Inggris (Sekutu).

Meskipun gencatan senjata disepakati, aksi tembak- menembak secara sporadis masih terus terjadi di beberapa tempat. Pada 30 Oktober 1945, Surabaya, mobil Buick yang ditumpangi A.W.S. Mallaby menjadi sasaran tembakan saat hendak melintasi Jembatan Merah. Terjadi baku tembak di tempat itu, yang berakhir dengan tewasnya Mallaby. Sementara itu, mobil Mallaby hangus terbakar akibat ledakan sebuah granat. Kematian Mallaby itu menjadi dalih bagi Inggris untuk menggempur rakyat Surabaya dan menuntut "menyerah tanpa syarat".

Pada tanggal 7 November 1945, pemimpin tentara Inggris yang baru, Mayjen E.C. Marsberg menulis surat kepada Gubernur Soeryo. Surat itu pada intinya berisi kecaman atas kematian Mallaby serta tuduhan bahwa sang Gubernur tidak mampu mengendalikan rakyatnya sendiri. Soeryo membalas surat Marsberg pada tanggal 9 November, yang pada intinya membantah semua tuduhannya.

Marsergh kemudian membuat surat balasan dengan nada yang tegas dan keras. Isi surat berbunyi antara lain: Inggris bertekad menuntut balas atas kematian Mallaby. Bagian lain surat bahkan berisi perintah kepada seluruh pimpinan Indonesia, kepala pemuda, kepala polisi, kepala pemerintah agar melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala. Selanjutnya, mereka harus menandatangani dokumen berisi penyerahan tanpa syarat, dan para pemuda yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya sambil membawa bendera putih sebagai tanda menyerah. Batas waktu yang ditentukan paling lambat pukul 06.00 tanggal 10 November 1945. Jika ultimatum ini tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan angkatan perangnya untuk menghancurkan Surabaya.

Tepat pukul 22.00 tanggal 09 November 1945, setelah merundingkannya dengan pemerintah pusat, Gubernur Soeryo melalui siaran radio menolak ultimatum Inggris tersebut. Maka, setelah batas waktu ultimatum habis, pertempuran tidak bisa dielakkan. Kontak senjata pertama pada 10 November terjadi di Tanjung Perak. Di tempat ini, pasukan Inggris berhasil mengendalikan perlawanan rakyat Surabaya. Banyak korban berjatuhan, tetapi rakyat Surabaya bersama-sama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terus melakukan perlawanan. Mereka memilih "merdeka" atau "mati".

Selama pertempuran berlangsung, di mana Inggris mulai menggempur Surabaya melalui darat, laut, dan udara, dua tokoh berikut ini tidak pernah diam: **Bung Tomo** dan **Soekarno**. Bung Tomo (1920–1981) dengan gigih dan berapi-api membakar semangat para pemuda dan masyarakat Surabaya dengan pidato-pidatonya di radio. Sementara itu, Soekarno berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris, direkam di tape recorder, lalu disiarkan ke seluruh dunia. Melalui pidato itu, ia melancarkan protes ke PBB. Soekarno juga mendesak Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman untuk turun tangan menghentikan aksi militer Inggris. Namun, protes Soekarno tidak dihiraukan Amerika Serikat dan PBB. Sementara itu, dalam pertemuan tanggal 9 November pukul 18.00, arek-arek Surabaya yang terdiri atas TKR, Polisi, dan para pemuda telah bersatu dalam tekad: "Tetap Merdeka! Kedaulatan Negara dan Bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan soenggoeh-soenggoeh, penoeh tanggoeng djawab bersama, bersatoe, ikhlas berkorban dengan tekad 'Merdeka atau Mati! Sekali merdeka tetap merdeka!'"

Setelah tiga minggu, para pejuang berhasil mempertahankan Surabaya dari pendudukan Inggris. Surabaya memang hancur, tetapi pertempuran ini menunjukkan suatu semangat serta sikap pantang mundur para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya, di kota ini kemudian dibangun Tugu Pahlawan dan setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.

4. Peristiwa Merah-Putih di Manado (14 Februari 1946)

Setelah mengetahui bahwa kemerdekaan telah diproklamasikan di Jakarta, masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara, melakukan aksi perlucutan senjata dan pengambilalihan kekuasaan dari Jepang. Gerakan ini diprakarsai oleh **Dewan Minahasa** yang dipimpin oleh **Mr. S.S. Pelengkahu**.

Pada bulan September 1945, datanglah tentara Sekutu yang membawa serta NICA. Mereka bermaksud menegakkan kembali pemerintahan Belanda di Kota Manado. Dalam kerangka itu, tentara Sekutu mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Minahasa. Kedatangan tentara Sekutu dan NICA serta tindak-tanduk mereka di Manado memicu kemarahan rakyat Minahasa. Hal ini memicu konflik bersenjata. Konflik pertama terjadi di Tondano dan Tomohon. Rakyat Minahasa terdesak mundur karena minimnya persenjataan. Mereka melanjutkan perlawanan dengan cara

gerilya. Dalam rangka memperkuat perlawanan, Gubernur Sulawesi Selatan, **dr. Sam Ratulangi**, memerintahkan agar segera dibentuk organisasi masyarakat yang diberi nama **Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat (PPKR)**. Ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang ditandatangani oleh 50 orang, yang menyatakan bahwa rakyat seluruh Sulawesi mendukung kemerdekaan Indonesia. Akibat tindakannya ini, dr. Sam Ratulangi ditangkap dan dibuang ke Serui, Papua oleh tentara Sekutu pada tahun 1946.

5. Pertempuran di Bandung (23 Maret 1946)

Pertempuran yang terjadi di Bandung ini lebih dikenal dengan istilah **Peristiwa Bandung Lautan Api**. Disebut demikian karena pada tanggal 23 Maret 1946 para pejuang Indonesia membumihanguskan Kota Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan NICA menggunakan semua fasilitas sebagai markas strategis militer mereka.

Pasukan Inggris tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Pada waktu yang bersamaan, TKR dan rakyat Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan serta merebut senjata dan peralatan lain dari tangan tentara Jepang. Sejak awal kedatangannya, hubungan tentara Sekutu dan rakyat Indonesia sudah tegang.

Selain membawa serta NICA, Inggris menuntut agar semua senjata api yang direbut dari Jepang dan beredar luas di tengah penduduk, kecuali TKR dan polisi, diserahkan kepada mereka. Rakyat Indonesia diberi batas waktu menyerahkan senjata paling lambat 21 November 1945. Ultimatum tersebut tidak diindahkan. Pertempuran pun tak terhindarkan.

Pada malam tanggal 21 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap wilayah kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Savoy Hormann dan Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas. Tiga hari kemudian, Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata.

Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum, agar TRI mengosongkan Kota Bandung. Ultimatum ini memicu TRI untuk melakukan operasi "bumi hangus" setelah sebelumnya memerintahkan evakuasi penduduk Kota Bandung. Keputusan membakar kota diambil karena para pejuang tidak rela Kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak Sekutu dan NICA. Selain itu, pembumihangusan Kota Bandung dianggap merupakan strategi yang tepat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan persenjataan pihak Sekutu dan NICA.

Hari itu juga, rombongan besar penduduk Bandung mengalir meninggalkan Bandung dan pada malam itu pembakaran kota berlangsung. Di mana-mana asap hitam mengepul membubung tinggi di udara dan semua listrik mati. Terjadi kontak senjata di setiap sudut kota. Pertempuran paling sengit terjadi di Desa Dayeuhkolot, sebelah selatan Bandung. Di tempat itu terdapat gudang amunisi besar milik Tentara Sekutu. Dalam pertempuran ini, **Muhammad Toha** dan **Ramdan**, dua anggota milisi BRI (Barisan Rakyat Indonesia), tewas dalam gudang amunisi yang mereka ledakkan dengan dinamit. Kurang lebih sekitar pukul 24.00, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Namun, api masih menyala dengan asap yang membubung membakar kota sehingga Bandung menjadi lautan api.

Setelah peristiwa tersebut, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini mengilhami terciptanya lagu Halo, Halo Bandung yang nama penciptanya masih menjadi bahan perdebatan sampai sekarang.

6. Pertempuran Margarana atau Puputan Margarana (18 November 1946)

Pertempuran yang terjadi di Margarana yang terletak sebelah utara Kota Tabanan, Bali, ini dipicu oleh hasil Perundingan Linggajati. Salah satu butir hasil perundingan tersebut menyatakan bahwa pengakuan secara de facto atas wilayah kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Selanjutnya, Belanda diharuskan sudah meninggalkan daerah de facto tersebut paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Dengan demikian, Bali tidak menjadi bagian dari Indonesia. Hal melukai hati rakyat Bali.

Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendaratkan kurang lebih 2.000 pasukannya di Bali. Belanda bermaksud menyatukan Bali dengan wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) lainnya. Pada saat yang sama, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, Komandan Resiman Sunda Kecil, sedang berada di Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan Markas besar TRI. Untuk mencapai maksud tersebut, Belanda membujuk Kepala Divisi Sunda Kecil **Letkol I Gusti Ngurah Rai** agar bersedia diajak bekerja sama untuk membentuk NIT. Namun, Ngurah Rai menolak dengan tegas dan siap melawan Belanda.

Peristiwa Puputan Margarana bermula dari perintah I Gusti Ngurah Rai kepada pasukannya yang bernama Ciung Wanara untuk melucuti persenjataan polisi NICA yang menduduki Kota Tabanan. Perintah yang keluar sekitar pertengahan November 1946 tersebut baru terlaksana tiga hari kemudian, persisnya pada malam tanggal 18 November 1946. Pada hari tersebut, pasukan Ciung Wanara berhasil menguasai detasemen polisi NICA di Tabanan serta merebut puluhan senjata lengkap dengan altilerinya. Setelah itu, pasukan Ciung Wanara kembali ke Desa Adeng-Marga, Tabanan.

Peristiwa ini memicu amarah Belanda. Dua hari setelah peristiwa itu, yaitu tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya dari seluruh Bali dan Lombok dan mulai mengisolasi Desa Adeng-Marga. Konon, Belanda juga harus mendatangkan bantuan dari semua tentaranya yang berada di Bali dan Lombok ditambah pesawat pengebom dari Makassar untuk menghadapi pasukan Ngurah Rai.

Setelah matahari menyingsing, sekitar pukul 09.00-10.00 WIT, pasukan Ciung Wanara baru sadar bahwa mereka dalam posisi terkepung oleh serdadu Belanda. Mereka memilih bertahan, dan aksi tembak-menembak tak terelakkan. Perang di Margarana ini juga dikenal dengan istilah **perang puputan**, yaitu perang yang dilakukan sampai dengan titik darah penghabisan. Kata puputan memiliki makna moral, karena dalam ajaran agama Hindu, kematian seorang prajurit dalam kondisi seperti itu akan menjadi sebuah kehormatan bagi keluarganya. Setelah bertempur dengan semangat pantang menyerah sampai titik darah penghabisan, Ngurah Rai dan 96 anggota pasukannya gugur.

Di pihak Sekutu, kurang 400 orang tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut, kini pada bekas arena pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Sementara itu, setiap tanggal 20 November juga diperingati sebagai hari perang Puputan Margarana.

7. Peristiwa Westerling di Makassar (7 Desember 1946)

Gubernur Sulawesi Selatan, **dr. Sam Ratulangi**, membentuk **Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI)** dengan ketua Manai Sophiaan. Organisasi ini merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Salah satu fokus kampanye serta gerakan organisasi ini adalah menentang pembentukan Negara Indonesia Timur oleh Belanda (NICA).

Pada tanggal 5 Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan **Kapten Raymond Westerling**. Ia memimpin 120 orang Pasukan Khusus dari Depot Speciale Troepen-DST (Depot Pasukan Khusus). Misi utama Westerling: menumpas pemberontakan (counter-insurgency) para pejuang dan rakyat Makassar Sulawesi Selatan yang menentang pembentukan Negara Indonesia Timur. Para pemuda seperti **A. Rivai, Paersi**, dan **Robert Wolter Monginsidi** yang tergabung dalam PPNI mengangkat senjata. Mereka berhasil merebut tempat-tempat strategis yang dikuasai NICA. Selanjutnya, Wolter Monginsidi, Ranggong Daeng Romo, dan Makkaraeng Daeng Jarung membentuk **Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS)** dengan tujuan utama menggerakkan perlawanan rakyat terhadap Belanda.

Perjuangan di Makassar ternyata tidak hanya dilakukan oleh para pemuda. Di antara mereka terdapat juga pejuang perempuan yang bernama **Emmy Saelan**. Dalam pertempuran di Kassi-Kassi, ia berlari mendekati posisi musuh dengan granat di tangan dan meledakkan granat tersebut ke posisi pasukan Belanda. Akibatnya, ia tewas bersama 8 orang tentara Belanda di tempat itu.

Untuk menumpas perlawanan rakyat Makassar, Westerling menerapkan metode Gestapo, suatu metode Gestapo yang diterapkan polisi rahasia Jerman yang terkenal kejamnya semasa Adolf Hitler. Pada masa Hitler, polisi rahasia Jerman menangkap dan membantai setiap orang yang mereka curigai sebagai musuh.

Belanda melakukan tindakan mengerikan itu dari tanggal 7-25 Desember 1946. Dalam kurun waktu itu, sekitar 40.000 rakyat sipil yang tidak berdosa dibunuh pasukan Westerling. Monginsidi sendiri ditangkap Belanda pada 28 Februari 1947. Namun, ia berhasil kabur pada 27 Oktober 1947. Belanda menangkapnya kembali dan kali ini Belanda menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Monginsidi dieksekusi oleh regu tembak pada 5 September 1949.

B

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan melalui Strategi Diplomasi

Selain dengan kekuatan senjata, perjuangan bangsa Indonesia Ddalam mempertahankan kemerdekaannya juga dilakukan melalui perundingan atau diplomasi. Diplomasi itu dilakukan dalam tiga cara, yaitu dengan mencari dukungan negara-negara anggota PBB, membawa masalah Indonesia-Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB, dan berunding secara langsung dengan Belanda.

Melalui forum PBB, misalnya, para tokoh nasional kita mengemukakan masalah bangsa Indonesia di depan sidang Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, para tokoh dan pejuang Indonesia melakukan sejumlah perundingan langsung dengan Belanda. Sebagai contoh, perundingan permulaan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari-12 Maret 1946 yang diprakarsai oleh panglima AFNEI Letjen Philip Christison. Dalam perundingan itu, Archibald Clark Kerr dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai penengah. Wakil Indonesia adalah **Sutan Sjahrir** selaku Perdana Menteri, H. Agus Salim, dan A.K. Pringgodigdo.

Sementara itu, **H.J. van Mook** tidak bertindak atas nama pemerintah Belanda tetapi atas nama pribadi. Dalam perundingan itu, van Mook mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah de facto Indonesia. Selain itu, ia juga mengusulkan agar Indonesia menjadi negara persemakmuran berbentuk federal yang memiliki pemerintahan sendiri tetapi menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Di pihak lain, Indonesia menginginkan pengakuan Belanda secara de facto atas Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Selanjutnya, usulan van Mook tentang negara persemakmuran ditolak oleh H. **Agus Salim**, salah seorang delegasi Indonesia. Salim tidak ingin Indonesia menjadi bagian dari Kerajaan Belanda, tetapi tetap menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh. Kerja sama antara Belanda dan Indonesia tetap dilanjutkan, tetapi hal itu merupakan kerja sama antara dua negara yang merdeka.

Van Mook kemudian ikut memprakarsai perundingan lanjutan yang melibatkan pemerintah Belanda, yang kelak diberi nama **Perundingan Hoge Veluwe** (Belanda), pada tanggal 12-24 April 1946. Delegasi Belanda dipimpin oleh Perdana Menteri Willem Schermerhorn, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Kehakiman Mr. Soewandi (didampingi Dr. Soedarsono dan Mr. A.K. Pringgodigdo). Perundingan membahas kembali butir-butir penting dalam perundingan dengan van Mook sebelumnya.

Perundingan ini gagal total: Belanda menolak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia secara de facto yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Sementara itu, usulan Belanda agar menjadi negara persemakmuran (commonwealth) berbentuk federal yang memiliki pemerintahan sendiri namun tetap menjadi bagian dari Kerajaan Belanda ditolak oleh Indonesia. Indonesia ingin menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh. Kerja sama antara Belanda dan Indonesia tetap dilanjutkan, tetapi itu merupakan kerja sama antara dua negara yang merdeka. Kegagalan Perundingan Hoge Veluwe serta ketegangan yang terus meningkat antara Indonesia dan Belanda mendorong lahirnya perundingan-perundingan baru berikut ini.

1. Perundingan Linggajati

Perundingan ini dilangsungkan di **Linggajati**, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946. Delegasi Indonesia terdiri dari **Sutan Sjahrir, Mohammad Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan dr. A.K. Gani**, sedangkan delegasi Belanda antara lain Prof. Willem Schermerhorn, F. de Boer, H.J. van Mook, dan Max van Poll. Bertindak sebagai mediator atau penengah adalah Lord Killearn dari Inggris. Pada saat itu, Sjahrir yang berasal dari Partai Sosialis menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia, yang lazim disebut Kabinet Sjahrir I (2 Oktober 1946-27 Juni 1947).

Perundingan Linggajati menghasilkan apa yang kemudian disebut **Perjanjian Linggajati**, yang isinya antara lain sebagai berikut.

- Belanda mengakui secara *de facto* Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah *de facto* ini paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.
- Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Serikat (RIS). Pembentukan RIS akan segera dilaksanakan sebelum tanggal Januari 1949. negara serikat dengan nama Republik Indonesia
- RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda,

Perjanjian Linggajati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 dalam sebuah upacara kenegaraan yang diselenggarakan di Istana Rijswijk atau Istana Negara sekarang. Perundingan Linggajati memiliki sisi positif dan negatif bagi pemerintah Indonesia. Sisi positifnya, perjanjian ini mengakui secara *de facto* wilayah Indonesia yang meliputi **Sumatera, Jawa, dan Madura**. Sisi negatifnya, pengakuan *de facto* tidak sesuai dengan luas wilayah Hindia Belanda, yang seharusnya meliputi wilayah dari Sabang hingga Merauke.

Secara internal, sisi negatif ini melahirkan kekecewaan dan resistensi sebagian rakyat terhadap Kabinet Sjahrir III. Beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata, misalnya, menganggap perjanjian itu sebagai bukti lemahnya pemerintah Indonesia mempertahankan kedaulatan. Akibatnya, sebagian besar anggota Partai Sosialis di kabinet dan KNIP menarik dukungan terhadap Sjahrir pada tanggal 26 Juni 1947. Sjahrir mengembalikan mandat Perdana Menteri-nya kepada Presiden Soekarno keesokan harinya, tanggal 27 Juni 1947.

Sementara itu, secara eksternal, pelaksanaan perjanjian ini pun tidak berlangsung mulus karena terjadi perbedaan penafsiran terhadap beberapa pasal. Sebagai contoh, Belanda menolak tafsiran bahwa Republik Indonesia sesuai dengan kekuasaan *de facto*-nya dapat mengadakan hubungan dengan luar negeri termasuk menempatkan perwakilannya. Selain itu, Belanda beranggapan bahwa pulau-pulau lain di luar Indonesia yang masih dikuasainya dapat menjadi negara sendiri jika memang dikehendaki. Karena penafsiran ini, misalnya, Belanda menolak klaim Indonesia atas Irian Barat. Menurut Belanda, penduduk Irian Barat ingin berdiri sendiri.

Penafsiran Belanda atas bunyi Perjanjian Linggajati didasarkan pada **pidato Ratu Wilhelmina** pada tahun 1942, yang menginginkan agar Indonesia dijadikan negara persemakmuran (*commonwealth*) Belanda dan akan berbentuk federasi. Selain itu, hubungan luar negerinya akan ditangani oleh Belanda.

Adanya perbedaan penafsiran tentang butir-butir Perjanjian Linggajati memicu ketegangan baru antara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 15 Juli 1947, Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Dr. H.J. van

Mook, menyampaikan pidato radio bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggajati. Puncaknya ketika Belanda melancarkan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia. Serangan ini dikenal sebagai **Agresi Militer Pertama** dan berlangsung pada tanggal **21 Juli 1947**.

Tujuan utama agresi Belanda sesungguhnya adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam terutama minyak. Untuk mengelabui dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai **Aksi Polisionil**, yaitu mengatasi kekacauan akibat teror dan huru-hara serta memulihkan ketertiban dan stabilitas di Indonesia. Maka, dalam propaganda Belanda, rakyat Indonesia yang melakukan perlawanan adalah kelompok pengacau dan pengganggu stabilitas.

Pada tanggal 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol Palang Merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya, ditembak jatuh oleh Belanda di Dusun Ngoto, Yogyakarta, yang menewaskan Komodor Muda Udara **Agustinus Adisucipto**, Komodor Muda Udara **dr. Abdulrahman Saleh**, dan Perwira Muda Udara **Adisumarmo Wiryokusumo**.

Pada tanggal 29 Agustus 1947, Belanda secara sepihak memproklamasikan apa yang **disebut Garis Demarkasi van Mook** atau singkatnya "Garis van Mook". Menurut Garis van Mook, wilayah Indonesia lebih sedikit sepertiga dari wilayah Jawa, yaitu hanya mencakup wilayah Jawa Tengah bagian timur, dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan wilayah laut. Hal ini jelas merugikan Indonesia.

Melalui Wakil Perdana Menteri A.K. Gani, Indonesia mendesak PBB untuk mengambil sikap. Pada saat yang sama, Indonesia melobi negara-negara sahabat untuk memperjuangkan Indonesia di PBB dan mendapat tanggapan yang positif. Wakil-wakil dari India dan Australia di PBB mengajukan usul agar masalah Indonesia ini dibahas dalam pertemuan Dewan Keamanan.

Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan, yang juga dihadiri diplomat sekaligus wakil Indonesia **Sutan Sjahrir** dan **H. Agus Salim**. Dewan Keamanan PBB kemudian mengakui eksistensi Republik Indonesia secara de facto. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947, DK-PBB secara resmi menggunakan nama INDONESIA, bukan Netherlands Indies. Hasil sidang Dewan Keamanan juga berupa seruan agar Indonesia dan Belanda melakukan gencatan senjata. Seruan PBB dipatuhi kedua pihak pada tanggal 17 Agustus 1947.

2. Komisi Tiga Negara (KTN)

Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Nama komisi ini adalah Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik untuk Indonesia), namun kemudian lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN). Disebut demikian karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham.

Komisi ini diperkuat oleh personil militer dari Amerika Serikat, sedangkan Perancis bertindak sebagai peninjau. Dalam pertemuannya pada tanggal 20 Oktober 1947, KTN memutuskan bahwa tugasnya di Indonesia adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda dengan cara-cara damai. Dalam kaitannya dengan hal itu, KTN berhak mengambil inisiatif untuk masalah militer, sedangkan untuk

masalah politik KTN hanya memberikan saran-saran. Pada tanggal 27 Oktober 1947, para anggota KTN telah tiba di Indonesia untuk memulai pekerjaannya.

3. Perjanjian Renville

Sesampainya di Jakarta, para anggota KTN ini melakukan kontak pendahuluan dengan pimpinan dari negara yang sedang bersengketa, yaitu Indonesia dan Belanda. Atas usul KTN perundingan antara dua negara ini sebaiknya dilakukan di sebuah tempat yang netral, yaitu di atas kapal angkatan laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville, sehingga perjanjian tersebut dinamakan **Perjanjian Renville**.

Perjanjian Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Hadir dalam perundingan tersebut adalah:

- Dr. Frank B. Graham (ketua), Paul van Zeeland (anggota), dan Richard Kirby (anggota).
- Delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Sjarifuddin (ketua), Ali Sastroamijoyo (anggota), Haji Agus Salim (anggota), dr. J. Leimena (anggota), dr. Coa Tiek len (anggota), dan Nasrun (anggota). Amir Sjarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada waktu itu (Kabinet Sjarifuddin II).
- Delegasi Belanda diwakili Abdulkadir Widjojoatmodjo (ketua), Mr. H.A.L van Vredenburg (anggota), Dr. P.J. Koets (anggota), dan Mr. dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil (anggota).

Meskipun jalannya perundingan tidak selancar yang diharapkan, perundingan ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu:

- Pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan;
- Belanda bebas membentuk negara-negara federal daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui jajak pendapat (plebisit) terlebih dahulu;
- Pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang Garis van Mook untuk kemudian masuk ke wilayah Indonesia.

Perjanjian ini mengundang reaksi keras baik dari rakyat Indonesia, politikus, maupun TNI. Pasalnya, dengan perjanjian ini, wilayah Indonesia menjadi semakin sempit, hanya "sebesar daun lontar" mengutip istilah Letjen Soedirman. Pemerintah dinilai gagal dalam perjuangan diplomasi.

Wilayah yang semakin sempit mempersulit posisi Indonesia baik secara ekonomi maupun politik dan militer. Dari segi ekonomi, perjanjian ini membuat semua kota besar termasuk pusat-pusat produksi dan perdagangan utama berada di tangan Belanda. Indonesia pun terkepung atau terblokade secara ekonomi. Sementara itu, bagi TNI hasil perundingan ini telah mengakibatkan mereka terpaksa meninggalkan sejumlah wilayah pertahanan (gerilya) yang telah dibangun dengan susah payah. Keputusan untuk hijrah ini diikuti perpindahan besar atau *kong march* **Divisi Siliwangi** ke Surakarta dan Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 1948. Pada tanggal 22 Februari 1948, kurang lebih 29.000 prajurit Siliwangi meninggalkan kantong-kantong gerilya di Jawa Barat. Dengan demikian, hijrah tidak hanya merugikan kita secara ekonomi dalam bentuk **blokade ekonomi**, tetapi juga secara politik dan militer.

Sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap pemerintah, partai-partai besar seperti Masyumi dan PNI menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Sjarifuddin. Kabinet ini pun jatuh. Perdana Menteri Amir Sjarifuddin menyerahkan kembali mandat kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948. Sementara itu, Belanda terus mewujudkan rencananya membangun negara boneka di daerah-daerah yang didudukinya.

Negara-negara boneka itu di antaranya Negara Indonesia Timur (NIT), Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan Negara Madura. Para tokoh dari negara-negara tersebut kemudian dihimpun dalam sebuah organisasi yang diberi nama **Biyeenkomst voor federal Overleg (BFO)** atau sebuah badan organisasi untuk kegiatan pertemuan dan musyawarah federal. Di sisi lain, dari Yogyakarta, rakyat, pemerintah, dan TNI bersatu dan aktif melancarkan serangan gerilya ke wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda.

Situasi keamanan di Jawa pun memburuk. Dengan alasan itu dan tudingan bahwa Indonesia sering melanggar genjatan senjata, Belanda mengepung Kota Yogyakarta pada tanggal **19 Desember 1948**. Aksi militer ini dikenal dengan nama **Agresi Militer Belanda II**.

Yogyakarta pun berhasil dikuasai dan para pemimpin Indonesia ditawan Belanda. Soekarno dan Hatta diasingkan ke Bangka setelah sebelumnya ditempatkan di Prapat, Sumatera Utara. Bersama kedua tokoh ini, diasingkan pula tokoh-tokoh lain seperti Sutan Sjahrir, Moh. Roem, Agus Salim, dan A.G. Pringgodigdo.

Sehari sebelum ditahan, yaitu pada tanggal 18 Desember, para pimpinan Indonesia ini sempat menggelar sidang Kabinet. Sidang tersebut memutuskan untuk mengirim radiogram kepada Menteri Kemakmuran **Syafruddin Prawiranegara** yang saat itu tengah berada di Sumatera untuk membentuk **Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)** dengan pusat di Bukittinggi. Jika Syafruddin Prawiranegara tidak berhasil, dikirim juga radiogram kepada Menteri M.M. Maramis, L.N. Pallar dan dr. Sudarsono yang sedang berada di India agar PDRI dapat dibentuk di India. Dalam suasana genting itu pula dibicarakan juga kemungkinan untuk mengungsikan presiden dan wakil keluar kota. Namun, keduanya memilih untuk tetap tinggal di Yogyakarta dengan risiko keduanya akan ditawan oleh Belanda. Mereka akhirnya memang ditawan Belanda pada hari berikutnya.

Menghadapi situasi di Indonesia ini, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang pada tanggal 24 Januari 1949. Dalam sidang tersebut, dihasilkan sebuah resolusi sebagai berikut.

- Belanda harus menghentikan semua operasi militernya dan Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilya. Kedua belah pihak harus bekerja sama mengupayakan perdamaian kembali.
- Belanda harus membebaskan dengan segera dan tanpa syarat semua tahanan politiknya yang berada di wilayah Indonesia sejak 19 Desember 1948.
- Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera, serta mengembalikan kekuasaan Indonesia sesuai dengan batas-batas wilayah Indonesia yang telah disepakati dalam Perjanjian Renville.
- Secepatnya akan dilakukan perundingan-perundingan kembali dengan mengacu pada Perjanjian Linggajati dan Perjanjian Renville.
- Segera dibentuk dewan pembuat UUD negara Republik Indonesia Serikat (RIS) selambat-lambatnya 1 Juli 1949.
- Dewan Keamanan PBB juga memutuskan bahwa KTN diubah namanya menjadi Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Indonesia atau United Nations Commission for Indonesia (UNCI) dengan anggota Critchley (mewakili Australia), Herremans (mewakili Belgia), Merle Cochran (mewakili Amerika Serikat). UNCI bertugas antara lain:
 - (1) membantu melancarkan jalannya perundingan,
 - (2) mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Indonesia,
 - (3) mengamati jajak pendapat (plebisit),

- (4) mengajukan usulan dan sara- saran yang dapat membantu tercapainya kesepakatan antara kedua negara.

Resolusi ini tidak dipatuhi oleh Belanda. Sebaliknya, Belanda semakin gencar mempropagandakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi dan berada di bawah kekuasaan Belanda. Menghadapi agresi Belanda serta sikapnya yang tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan, TNI di bawah komando **Panglima Besar Jenderal Soedirman** beserta para tokoh sipil memutuskan untuk melakukan sebuah serangan yang spektakuler dalam rangka mematahkan propaganda Belanda.

Gagasan itulah yang melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai **Serangan Umum 1 Maret 1949** di Yogyakarta. Ringkasnya, Serangan Umum 1 Maret terutama bertujuan membuktikan eksistensi Republik Indonesia dan TNI kepada dunia internasional sekaligus mematahkan propaganda Belanda bahwa Republik tidak ada lagi.

Serangan terhadap Kota Yogyakarta yang dipimpin Komandan Brigade 10 daerah Wehrkreise III Letnan Kolonel Soeharto itu disetujui oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Serangan yang sama dilakukan juga di Kota Solo (Surakarta). Bagi rakyat Indonesia, Serangan Umum 1 Maret mampu menguatkan posisi Republik Indonesia serta mempermalukan Belanda yang mengklaim bahwa Republik Indonesia sudah lemah dan dikuasai sepenuhnya oleh Belanda.

4. Perjanjian Roem-Royen (17 April 1949)

Situasi yang semakin memburuk mendorong berlanjutnya berbagai upaya diplomasi. UNCI, misalnya, melakukan pertemuan dengan para pemimpin Indonesia di Bangka, demikian pula dengan **Biyeenkomst voor federal Overleg (BFO)** yang mengirim utusan menemui presiden dan wakil presiden dalam rangka mencari titik temu. Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) juga menugaskan UNCI untuk membantu pelaksanaan resolusi DK-PBB. UNCI akhirnya berhasil membawa kembali Belanda dan Indonesia ke meja perundingan. Kali ini, delegasi Indonesia diketuai oleh **Mr. Mohammad Roem**, dan dari pihak Belanda diketuai oleh **Dr. Frederick van Royen**. Pada tanggal 17 April 1949, dimulailah perundingan pendahuluan yang berlangsung di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan ini dimediasi oleh **Merle Cochran**, wakil Amerika Serikat dalam UNCI. Dalam perundingan berikutnya, delegasi Indonesia diperkuat oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Setelah melewati negosiasi yang alot, akhirnya dicapai kesepakatan pada tanggal 7 Mei 1949. Kesepakatan yang dikenal dengan **Persetujuan Roem-Royen** ini berisi antara lain bahwa pemerintah Indonesia bersedia untuk:

- memerintahkan "seluruh pengikut Republik yang bersenjata" untuk menghentikan perang gerilya;
- bekerja sama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan menjaga perdamaian;
- turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan tujuan mempercepat "penyerahan" kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat setelah para pemimpin pemerintahan kembali ke Yogyakarta.

Sementara itu, pernyataan dari pihak Belanda adalah:

- Menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik;
- Menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta;
- Menyetujui RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat;
- Berusaha akan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar.

Pada tanggal 6 Juli 1949, Soekarno-Hatta kembali ke Yogyakarta. Kembalinya presiden dan wakil presiden ini diikuti dengan penarikan mundur pasukan Belanda dari Yogyakarta. Dengan demikian, pendudukan Belanda atas Yogyakarta sejak 19 Desember 1948 berakhir.

5. Konferensi Inter Indonesia (19-22 Juli 1949 dan 31 Juli-2 Agustus 1949)

Sebelum berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, telah dilakukan dahulu pendekatan dan koordinasi dengan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), terutama yang berkaitan dengan pembentukan RIS. Konferensi Inter Indonesia dipandang penting untuk menyatukan pandangan politik dalam rangka menghadapi Belanda dalam KMB.

Konferensi Inter Indonesia baru dilaksanakan setelah pemimpin Indonesia kembali ke Yogyakarta. Konferensi Inter Indonesia ini berlangsung dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung pada 19-22 Juli 1949, di Kaliurang, Yogyakarta. Pelaksanaannya dipimpin oleh Mohammad Hatta. Sementara itu, tahap kedua, yang berlangsung pada 31 Juli-3 Agustus 1949, diadakan di Jakarta di bawah pimpinan Sultan Hamid selaku ketua BFO.

Pembicaraan dalam konferensi ini hampir seluruhnya tentang masalah pembentukan negara Republik Indonesia Serikat (RIS), di antaranya menyangkut masalah tata susunan dan hak pemerintah RIS serta bentuk kerja sama antara RIS dan Belanda dalam perserikatan Uni itu. Dalam hal ini, BFO mendukung tuntutan Indonesia atas penyerahan kedaulatan tanpa ikatan-ikatan politik ataupun ekonomi. Dalam bidang pertahanan dan militer, konferensi ini memutuskan beberapa hal sebagai berikut.

- Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) merupakan angkatan perang nasional;
- TNI merupakan kekuatan inti APRIS. APRIS akan menerima orang-orang Indonesia yang ada di dalam kesatuan KNIL, VB (Veilighelds Bataljons), dan kesatuan tentara Belanda lainnya dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut;
- Pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintah RIS. Negara-negara bagian lain tidak mempunyai angkatan perang sendiri.

Pada tanggal 1 Agustus 1949, Indonesia dan Belanda bersepakat menghentikan tembak-menembak. Kesepakatan itu berlaku efektif mulai tanggal 11 Agustus 1949 untuk seluruh Jawa, sedangkan untuk wilayah Sumatera dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1949. Keberhasilan dari kesepakatan-kesepakatan inilah yang memungkinkan terselenggaranya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda dari bulan Agustus sampai November 1949.

6. Konferensi Meja Bundar (23 Agustus 1949- 2 November 1949)

Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Ridderzaal, Den Haag, Belanda dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949, dengan dihadiri oleh delegasi dari Indonesia, Belanda, BFO, dan UNCI. Delegasi Indonesia dipimpin oleh **Mohammad Hatta**, delegasi Belanda dipimpin oleh J.V. Maarseven, delegasi BFO dipimpin oleh **Sultan Hamid**, dan UNCI diketuai oleh **Chritchley**. Konferensi dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda **Willem Drees**. Dalam konferensi itu dibentuk tiga komisi, masing-masing membahas masalah **ketatanegaraan**, **keuangan**, dan **militer**. Beberapa masalah yang kemudian muncul di antaranya sebagai berikut.

- Persoalan kerja sama dalam Uni Indonesia dan Belanda. Indonesia menginginkan kerja sama yang bebas tanpa organisasi yang permanen; Belanda menghendaki kerja sama yang luas dengan pembentukan organisasi yang luas pula.

- Dalam hal yang terkait dengan masalah utang, Indonesia hanya mengakui utang-utang Hindia Belanda yang dimulai pada saat menyerahnya Belanda kepada Jepang (1942). Namun, Belanda menghendaki bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan termasuk utang-utang Belanda sampai saat itu, termasuk biaya yang digunakan dalam membiayai perang kolonial terhadap Indonesia.

Setelah perundingan yang berlarut-larut, pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan KMB, dengan hasil-hasil utamanya sebagai berikut.

- Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949;
- Diputuskan pula beberapa persetujuan pokok yang terkait masalah keuangan, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lainnya;
- Mengenai soal Irian Barat, penyelesaiannya akan ditunda selama satu tahun;
- Persetujuan KMB juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti. KNIL akan dibubarkan dan para anggotanya akan masuk ke dalam APRIS;
- Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda. Uni akan merupakan badan konstitusi bersama dalam menyelesaikan kepentingan umum; Indonesia membayar utang-utang Belanda sejak tahun 1942.

7. Penyerahan Kedaulatan (27 Desember 1949)

Pada tanggal 23 Desember 1949, wakil presiden **Mohammad Hatta** berangkat ke Belanda memimpin delegasi RIS. Misi utamanya adalah menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Upacara penandatanganan ini akan dilangsungkan secara bersamaan baik di Indonesia maupun di Belanda dengan sebuah upacara pada tanggal **27 Desember 1949**. Di Belanda, upacara penandatanganan penyerahan kedaulatan dilaksanakan di ruang takhta Kerajaan Belanda.

Para penandatanganan yang hadir adalah **Ratu Juliana**, Perdana Menteri **Dr. Willem Drees**, Menteri Seberang Lautan **Mr. A.M.J.A. Sassen**, **Mohammad Hatta**. Di Jakarta, Sultan Hamengkubuwana IX dan wakil tinggi mahkota **A.H.J. Lovink** secara bersama-sama juga menandatangani naskah penyerahan kedaulatan.

Pada tanggal yang sama juga di Yogyakarta dilakukan pula penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Setelah penandatanganan, Presiden Soekarno kembali ke Jakarta untuk memangku jabatan baru sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Setelah hampir selama 4 tahun ditinggalkan, Jakarta kembali berfungsi sebagai ibu kota, kali ini ibu kota Republik Indonesia Serikat (RIS).